

Kelapa Sawit dan Bencana Alam: Makna Sosiologis Diskursus Dampak Ekologis Ekspansi Sawit

Siska Adhariani , dan Afrizal * 

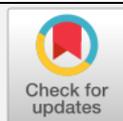
Program Studi Magister Sosiologi, Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Andalas, 25163, Padang, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia

* Korespondensi: afrizal@soc.fisip.unand.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



Sitasi Cantuman:

Adhariani, S., & Afrizal, A.
(2021). Palm Oil and Natural
Disasters: Sociological Meanings
of Discourses on the Ecological
Impact of Oil Palm Expansion.
Society, 9(1), 37-53.

DOI: [10.33019/society.v9i1.286](https://doi.org/10.33019/society.v9i1.286)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh
Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-
NonKomersial-BerbagiSerupa
(CC BY-NC-SA)

Dikirim: 12 Januari, 2021;

Diterima: 18 Maret, 2021;

Dipublikasi: 27 April, 2021;

ABSTRAK

Sejak awal dan hingga saat ini, perkebunan kelapa sawit menjadi kontroversi di Indonesia. Meskipun banyak bukti yang disajikan oleh para pendukung yang membuktikan bahwa ekspansi kelapa sawit telah memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, dari sudut pandang ekologis, hal tersebut diklaim oleh para kritikus memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, salah satunya adalah penyebab bencana alam. Kaitan antara ekspansi kelapa sawit dan bencana alam, kemudian, menjadi perdebatan antara kritikus dan pendukung ekspansi kelapa sawit. Penelitian ini mengkaji tema wacana kritik ekspansi sawit sebagai penyebab bencana alam dan kontra wacana pendukung ekspansi sawit. Dengan menggunakan metode studi literatur dan perspektif sosiologi lingkungan, diperoleh hasil bahwa diskursus tentang dampak perluasan perkebunan kelapa sawit menunjukkan adanya kontradiksi antara pandangan Paradigma Ekologi Baru (PEB) dan Paradigma Keterpisahan Manusia (PKM). Pemerintah Indonesia membangun diskursus tandingan yang modernisasi ekologis untuk mempertahankan dan mengembangkan ekspansi perkebunan kelapa sawit.

Kata Kunci: Bencana Alam; Diskursus Keberlanjutan; Diskursus Tandingan; Komunitas Terdampak; Perkebunan Kelapa Sawit

1. Pendahuluan

Walaupun telah dimulai di Indonesia semenjak 1911 (Afrizal, 2007, p. 95), perkembangan besar-besaran perkebunan kelapa sawit terjadi mulai tahun 1980, terkait dengan perkembangan permintaan minyak sawit dunia (Afrizal, 2007, p. 152; Colchester & Chao, 2013). Pada tahun 2018, tercatat seluas 14.326.350 ha perkebunan sawit di Indonesia (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019).

Perkebunan kelapa sawit tersebut kontroversial (Rival & Levang, 2014; Austin et al., 2017, p. 41). Banyak bukti perkebunan kelapa sawit berkontribusi penting terhadap perekonomian Indonesia. Perkebunan kelapa sawit memberikan pendapatan bagi pemerintah dan warga setempat serta alternatif penyedia lapangan pekerjaan (Syahza, 2008; Mongabay.co.id, 2013; Majalah Sawit Indonesia, 2014; Potter, 2015, p. 10; Dharmawan et al., 2016, pp. 3-6). Di sisi yang lain, ekspansi sawit berdampak negatif. Ada empat dampak negatif ekspansi sawit yang mendapat perhatian besar: konflik alih fungsi tanah, deforestasi, kehilangan keragaman hayati, dan bencana alam (Noveria et al., 2004; Afrizal, 2007, pp. 156-175; Sheil et al., 2009; Colchester & Chao, 2013; Vijay et al., 2016).

Pelaku gerakan lingkungan menyoroti dampak ekspansi sawit dari sudut dampak ekologis. Kritik yang mereka ajukan membawa diskursus ekspansi sawit bergeser dari dampak ekonomi ke dampak ekologis yang negatif. Dalam perkembangannya, kritik terhadap ekspansi perkebunan kelapa sawit membuat para pendukung ekspansi kelapa sawit merespons dengan memunculkan wacana tandingan untuk membela keberlanjutan perkebunan kelapa sawit.

Penelitian ini fokus pada perdebatan dampak ekologis ekspansi sawit, khususnya bencana alam. Berdasarkan studi literatur, penelitian ini menyajikan tema-tema diskursus ekspansi kelapa sawit sebagai penyebab bencana alam dan diskursus tandingannya tersebut dan respon pemerintah Indonesia. Pertanyaan yang dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa tema-tema wacana ekspansi kelapa sawit penyebab bencana alam?; Apa respon pemerintah Indonesia terhadap kritik ekspansi sawit? Dengan menggunakan metode kajian literatur serta Perspektif Sosiologi Lingkungan, hasil penelitian menunjukkan wacana dampak ekologis ekspansi perkebunan sawit memperlihatkan kontradiksi antara pandangan *New Ecological Paradigm* (NEP)/Paradigma Ekologis Baru (PEB), dengan *Human Exemptionalism Paradigm* (HEP)/Paradigma Keterpisahan Manusia (PKM). Sementara itu, pandangan modernisasi ekologis digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk merespon kritik terhadap ekspansi sawit.

2. Tinjauan Pustaka

Analisis penelitian ini diinformasikan oleh teori sosiologi lingkungan, khususnya *New Ecological Paradigm* (NEP), selanjutnya disebut Paradigma Ekologis Baru (PEB) dan *Human Exemptionalism Paradigm* (HEP), selanjutnya disebut Paradigma Keterpisahan Manusia (PKM). Perbedaan antara PEB dan PKM pertama kali dirumuskan oleh Riley R. Dunlap dan William R. Catton pada era 1970an dalam berbagai publikasi mereka.

PKM dan PEB keduanya merupakan wacana sosiologis tentang bagaimana masyarakat seharusnya dibicarakan dari sudut pandang sosiologis. PKM memandang masyarakat terpisah dari alam, karena itu mengabaikan kendala alam terhadap pengembangan masyarakat (Catton & Dunlop, 1978, p. 43). Dengan pandangan itu, orang-orang yang menganut PKM fokus pada masyarakat dengan "mengabaikan habitat" (Catton & Dunlop, 1978, p. 44). Berarti, PKM mengusung gagasan Antroposentrisme - paham yang menempatkan manusia sebagai pusat dalam alam semesta (Kortenkamp & Moore, 2001, p. 2; Américo et al., 2007, p. 99; Américo et al., 2012, p. 355) - untuk berdebat tentang masyarakat. Sebaliknya, PEB, yang diperkenalkan oleh Sosiolog Lingkungan pada era 1970an (Catton & Dunlop, 1978, p. 30), berpendirian ada

hubungan timbal balik antara alam dengan masyarakat (Catton & Dunlop, 1978, p. 45). Karena itu, menurut PEB, wacana pengembangan masyarakat harus mempertimbangkan alam dan melihatnya sebagai kendala untuk pengembangan masyarakat (Catton & Dunlop, 1978, pp. 46-48; Albrecht, 1982, pp. 9-10). Terlihat, PEB mengandung gagasan ekosentrisisme, yang memandang alam mesti dihargai berdasarkan kegunaan untuk dirinya sendiri (Mol & Spaargaren, 2000, p. 138; Kortenkamp & Moore, 2001, p. 2). Dengan gagasan itu, PEB digunakan sebagai indikator kepedulian lingkungan yang mencerminkan orientasi sikap pro-lingkungan (Dunlap *et al.*, 2000, p. 428).

Baik PKM dan PEB merupakan suatu pandangan tentang hubungan antara masyarakat dengan alam dan berfungsi sebagai skema interpretasi (Albrecht, 1982, p. 11), referensi dalam pikiran yang digunakan untuk menginterpretasikan realitas. Karena pandangannya, orang yang menganut PKM kurang peduli dengan konservasi lingkungan fisik, sebaliknya, karena pandangannya orang yang menganut PEB pro lingkungan (Catton & Dunlop, 1978; Albrecht, 1982, p. 11).

Muncul perdebatan tentang cara menemukan keseimbangan antara keinginan publik untuk hidup secara harmonis dengan alam dengan kebutuhan untuk mengeksploitasi sumber daya alam untuk mempertahankan kehidupan dan berkembang secara ekonomis. Kemudian, sejak awal tahun 1980 mulai berkembang wacana modernisasi ekologis.

Modernisasi ekologis menentang wacana demodernisasi, yang memandang suatu keperluan untuk mereorganisasi tatanan kehidupan masyarakat modern agar pembangunan berkelanjutan dapat terjadi (Mol & Spaargaren, 2000, p. 19; Carolan, 2004, p. 249). Modernisasi ekologis berpendirian, kemajuan ekonomi malah jalan yang strategis untuk menangani krisis lingkungan, untuk ini sumber daya alam perlu dikomoditifikasi, tetapi dengan cara meminimalkan dampak negatifnya terhadap lingkungan dengan teknologi (Andersen & Massa, 2000, pp. 338-340; Mol & Spaargaren, 2000, pp. 20-21; Carolan, 2004, p. 249). Keyakinan pokoknya adalah kontrol dari pemerintah terhadap pelaku usaha dapat membuat perilaku korporasi pro-lingkungan (Andersen & Massa, 2000; Carolan, 2004, p. 250). Dengan itu, modernisasi ekologi tergambar dalam kebijakan pemerintah (Andersen & Massa, 2000, p. 344).

3. Metodologi Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kajian literatur (buku dan artikel jurnal), publikasi di web, dan berita surat kabar. Literatur diperoleh dari penelusuran dengan Google searching dan koleksi sendiri. Kriteria artikel jurnal dan buku yang dipelajari adalah yang membicarakan dampak ekspansi sawit di Indonesia.

Analisis data dilakukan dengan cara semua publikasi dipelajari berkali-kali, kemudian direduksi dengan menandai informasi yang sesuai. Setelah itu, dilakukan kodifikasi dengan menggunakan kerangka coding yang dibuat berdasarkan konsep PEB, PKM, dan modernisasi ekologis. Tema-tema dibuat setelah melakukan interpretasi secara struktural terhadap data yang telah direduksi. Interpretasi data memperhatikan kata, kalimat, dan wacana lain dalam buku, artikel ilmiah, dan pernyataan di website.

Kata kritik digunakan dalam dua arti: ekspresi tidak mendukung terhadap seseorang dan sesuatu dan telaah sesuatu dari dua sisi keunggulan dan kelemahan. Publikasi yang menonjolkan kelemahan dinilai sebagai tulisan ekspresi tidak mendukung ekspansi kelapa sawit. Sebaliknya, publikasi yang menonjolkan keunggulan ekspansi kelapa sawit dinilai sebagai publikasi yang mendukung ekspansi kelapa sawit. Orang-orang yang menekankan pada sisi negatif ekspansi sawit disebut pengkritik ekspansi sawit, orang-orang yang menekankan pada keunggulan kelapa sawit disebut pendukung ekspansi kelapa sawit.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1. Tema-Tema Wacana Kelapa Sawit Penyebab Bencana Alam

Ada dua tema yang ditemukan: 1) Deforestasi akibat ekspansi sawit penyebab bencana alam, dan 2) Ekspansi sawit penyebab polusi udara.

4.1.1. Deforestasi Akibat Ekspansi Sawit Penyebab Bencana Alam

Ada dua pandangan pengkritik tentang kaitan antara ekspansi perkebunan sawit dengan bencana alam. Pandangan pertama adalah ekspansi sawit menyebabkan bencana alam tidak secara langsung, sedangkan pandangan kedua menyatakan ekspansi perkebunan sawit penyebab bencana alam secara langsung. Ekspansi sawit menyebabkan bencana alam melalui kontribusi penting produksi sawit terhadap perubahan iklim global melalui deforestasi. Karena itu, perbincangan ekspansi sawit sebagai penyebab deforestasi sangat mereka tekankan. Ekspansi besar-besaran dan skala luas sawit dinyatakan penyebab deforestasi. Dalam sebuah tulisan, pengkritik sawit menyatakan, “menurut Indeks Keberlanjutan Pangan, ...budidaya kelapa sawit, yang melibatkan penebangan hutan tropis atau pembakaran lahan gambut, telah memainkan peran utama dalam peningkatan tingkat deforestasi di Asia Tenggara, dan terutama di Indonesia dan Malaysia ([The Economist, 2018](#)). Hal yang sama ditemukan dalam berita Mongabay ([Mongabay.co.id, 2013](#)) “Ekspansi kebun sawit berdampak pada deforestasi dan degradasi hutan”.

Banyak pengkritik ([Tabel 1](#)) ekspansi sawit tidak secara eksplisit menyatakan ekspansi sawit penyebab bencana alam. Kaitan keduanya terlihat dari argumen bahwa deforestasi skala luas, yang dinyatakan akibat dari ekspansi perkebunan sawit besar-besaran, berkontribusi secara berarti terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim ini kemudian penyebab bencana alam. Jika tidak dalam konteks perubahan iklim, tentunya kurang berarti pembicaraan dampak ekspansi sawit terhadap laju deforestasi.

Tabel 1. Beberapa Contoh Wacana Dampak Ekologis Ekspansi Kelapa Sawit

Wacana Dampak Ekologis Ekspansi Sawit	Pembuat Wacana
“Pemanasan global: Dari kelapa sawit sangat erat dengan sumber-sumber emisi gas rumah kaca dari proses produksi dan rantai pasok minyak sawit yang mengakibatkan rusaknya fungsi dan kemampuan serapan gas rumah kaca oleh lahan, hutan, dan gambut, termasuk gas-gas yang dihasilkan dari pabrik minyak sawit dan residu gas dari pupuk pertanian bahan kimia dan bahan bakar fosil aktifitas mesin pabrik dan perkebunan kelapa sawit”.	TUK Indonesia (2015)
Dampak lingkungan, yakni Perkebunan kelapa sawit mengurangi kemampuan hutan mengkonversi CO ₂ sehingga perkebunan kelapa sawit mendorong global warming lebih cepat	Tandan Sawit (2015, p. 6)

Wacana Dampak Ekologis Ekspansi Sawit	Pembuat Wacana
"Ekspansi perkebunan kelapa sawit telah mengakibatkan perubahan tutupan lahan hutan yang berdampak pada perubahan ekologi suatu kawasan".	Amalia et al. (2019, p. 137)
"Dampak lingkungan dari perkebunan kelapa sawit skala besar termasuk hilangnya keanekaragaman hayati yang luar biasa, peningkatan emisi gas rumah kaca, deforestasi yang masif, penipisan nutrisi tanah, kekeringan dan penandusan/penggururan dan polusi air akibat limbah beracun".	Colchester & Chao (2013)

Pandangan yang kedua: deforestasi penyebab langsung bencana alam. Ekspansi sawit besar-besaran diasosiasikan dengan kejadian banjir di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Misalnya, staf WALHI menyatakan banjir yang akhir-akhir ini sering terjadi di Riau karena banyaknya kawasan hutan dialihfungsikan menjadi kebun sawit ([Tempo.co, 2017](#)). Selain itu, ketua Forum Daerah Aliran Sungai Siak menegaskan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit benar penyebab banjir di sekitar area perkebunan kelapa sawit seperti di Kabupaten Siak ([Kompasiana.com, 2015](#)). Dari hasil penelitiannya, seorang peneliti mengkonfirmasi bahwa di lokasi penelitiannya banjir semakin sering setelah ekspansi perkebunan kelapa sawit ([Amalia et al., 2019, p. 137](#)).

Para pengkritik menyatakan ekspansi sawit merusak kondisi ekologis setempat dan ini menyebabkan banjir karena air hujan tidak terserap. Misalnya, staf WALHI menyatakan banjir yang akhir-akhir ini sering terjadi di Riau karena banyaknya kawasan hutan dialihfungsikan menjadi kebun sawit membuat hutan tidak lagi mempunyai fungsi menahan air secara ekosistem ([Tempo.co, 2017](#)). Penjelasan yang komprehensif diberikan oleh Ketua Forum Daerah Aliran Sungai Siak: "Kelapa sawit merupakan tumbuhan monokotil (berakar serabut) sehingga air hujan yang melimpah tidak terserap ke dalam tanah dan hanya mengalir di daratan menuju aliran sungai. Air yang mengalir tersebut akan membawa zat hara dan mengendap di dasar sungai. Akibatnya, tanah akan menjadi gersang dan sungai akan semakin dangkal", ([Kompasiana.com, 2015](#)).

4.1.2. Ekspansi Kelapa Sawit Penyebab Polusi Udara

Polusi udara merupakan bencana alam berikut yang dinyatakan oleh pengkritik akibat dari ekspansi sawit. Dampak polusi udara yang mendapat sorotan mereka adalah kabut asap ([Glauber & Gunawan, 2016](#); [Purnomo et al., 2018](#)). Kabut asap itu dinyatakan akibat dari pembakaran lahan dan hutan yang dilakukan untuk pembukaan lahan baru bagi penanaman baru kelapa sawit. Dalam wacana pengkritik dan proponent ekspansi sawit, perhatian mereka diberikan pada aktor pembakar lahan dan hutan serta motif perbuatan mereka.

Para pengkritik ekspansi sawit menyatakan perusahaan besar kelapa sawit merupakan salah satu aktor utama pembakaran lahan dan hutan. Motif mereka untuk membersihkan lahan untuk penanaman kelapa sawit baru. Misalnya, WALHI menyatakan "... sebagian besar titik api berada di wilayah konsesi grup-grup besar perusahaan transnasional", sebagian berada dalam area konsesi perkebunan kelapa sawit besar" ([WALHI, 2019b](#)). Kemudian, sebuah media

online melaporkan pernyataan WALHI terkait dengan kebakaran hutan: “KLHK juga telah menyegel 42 lahan konsesi milik perusahaan dan 1 lahan perorangan yang terbakar yang diduga milik pelaku pembakaran hutan” (Deustche Welle, 2019).

Ada laporan penelitian yang menyatakan pelaku penting kebakaran hutan di Kalimantan adalah para petani kecil yang membakar lahan/hutan untuk pembukaan secara tradisional lahan pertanian baru. Publikasi seorang peneliti tentang hal ini mengilustrasikan hal tersebut.

Berdasarkan data dari ketua adat melayu Kabupaten Sanggau, semua kepala keluarga yang memiliki perkebunan kelapa sawit membuka lahan dengan cara dibakar dan dilakukan di musim kemarau karena curah hujan yang sedikit hingga tidak terjadi hujan sama sekali dalam beberapa hari, yang kemudian membuat teknik bakar ini menjadi primadona untuk membuka lahan perkebunan sawit. Selain karena sudah menjadi adat istiadat setempat, cara bakar ini terbilang murah. Hal ini selalu dilakukan karena tidak dilarang oleh Peraturan Daerah Kalimantan Barat dimana kelonggarannya adalah pembukaan lahan dengan cara tradisional masih dapat dilakukan. Pembukaan lahan dengan cara dibakar tentu menimbulkan dampak. Apalagi bila dilakukan bersama-sama di musim kemarau, asap yang ditimbulkan akibat pembakaran lahan akan terlihat dan menghasilkan asap hitam di udara (Emilya & Sumiyati, 2018, p. 710).

Namun, WALHI menolak pandangan bahwa petani kecil sebagai pelaku utama pembakaran hutan. NGO lingkungan ini tidak menafikan petani kecil pelaku pembakaran hutan dan lahan untuk membuka lahan pertanian baru dan ini penyebab kabut asap. Namun, menurut mereka, pelaku utamanya yang mengakibatkan kebakaran lahan dan hutan skala luas adalah perusahaan, termasuk perusahaan perkebunan. Seperti kutipan narasi WALHI di atas, terlihat pelaku pembakaran hutan petani kecil dinyatakan sangat sedikit. Pernyataan WALHI (2019b) bahwa “Dalam temuan WALHI yang sudah disampaikan pada tahun 2015, bahwa sebagian besar titik api berada di wilayah konsesi grup -grup besar perusahaan transnasional ” menegaskan bahwa bukan petani kecil pelaku pembakaran lahan dan hutan yang penting.

4.2. Wacana Tandingan

Perhatian diberikan terhadap wacana kelapa sawit ramah lingkungan yang dikonstruksi oleh Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS). Keberadaan ketiga organisasi tersebut bertujuan untuk keberlangsungan bisnis kelapa sawit. PASPI adalah NGO yang fokus pada keberlanjutan bisnis kelapa sawit, GAPKI merupakan asosiasi pelaku bisnis kelapa sawit, dan PPKS merupakan badan usaha pelaku riset pengembangan kelapa sawit. Dibandingkan dengan GAPKI dan PPKS, PASPI lebih komprehensif menarasikan wacana tandingan dampak ekspansi sawit, karena itu wacana yang dikonstruksi PASPI lebih diberikan perhatian dalam penelitian ini.

Pada tahun 2016, PASPI menerbitkan buku yang berjudul “Mitos vs Fakta: Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Global”, edisi ke-2. Buku ini diarahkan sebagai kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit (PASPI, 2016, pp. v-vi). Untuk membuat gagasan persuasif, digunakan kata mitos dan fakta sebagai *framing*.

Buku ini menegaskan pandangan yang menyatakan ekspansi sawit penyebab kerusakan lingkungan dan penyebab bencana alam adalah mitos dan karenanya tidak terjadi (PASPI, 2016). Untuk menegaskan pandangan tersebut, PASPI membangun wacana kelapa sawit ramah lingkungan, ini disebut fakta. Sejauh yang terkait dengan bencana alam, ada empat tema penting wacana kelapa sawit ramah lingkungan: Ekspansi kelapa sawit bukan penyebab utama

deforestasi di Indonesia; ekspansi kelapa sawit bukan penyebab perubahan iklim global; ekspansi kelapa sawit bukan penyebab banjir; tidak hanya ekspansi kelapa sawit penghasil polusi udara.

4.2.1. Ekspansi Kelapa Sawit Bukan Penyebab Utama Deforestasi

PASPI berusaha meyakinkan berbagai pihak bawa ekspansi sawit penyebab tidak berarti deforestasi. NGO pembela sawit ini mendasarkan pernyataannya pada telaah hasil-hasil penelitian, dan menyatakan deforestasi yang disebabkan oleh ekspansi sawit kecil dan karenanya tidak berarti. "Sawit yang berasal dari deforestasi (dari konversi hutan produksi terganggu) hanya sekitar 2.5 juta hektar, sedangkan yang dari reforestasi (dari konversi lahan pertanian dan lahan terlantar) sebesar 7.9 juta hektar". Malah PASPI menyimpulkan perluasan kebun sawit di Indonesia malah reforestasi seluas 5.3 juta hektar (PASPI, 2016, pp. 118-119).

Untuk menegaskan ekspansi sawit penyebab deforestasi tidak berarti, PASPI menyatakan deforestasi lebih disebabkan oleh pembangunan secara umum. Pembangunan padang penggembalaan, perkebunan tebu, kacang kedelai, rapeseed dan sunflower menjadi pemicu utama deforestasi global. Ini disampaikan ketika membahas MITOS 2-01.

Walaupun sedikit berbeda, GAPKI tidak menampik ekspansi sawit berkontribusi terhadap deforestasi, sama dengan PASPI badan sawit Indonesia ini menegaskan deforestasi telah ditimbulkan oleh berbagai kegiatan pertanian dan pembangunan di seluruh dunia. Karena itu, GAPKI menyatakan pengkritik ekspansi kelapa sawit tidak fair menekankan terlalu berat pada industri kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi (GAPKI, 2017a).

4.2.2. Ekspansi Kelapa Sawit Bukan Penyebab Banjir di Indonesia

Menampik ekspansi kelapa sawit penyebab utama deforestasi, terkait dengan dampak banjir, dampak langsung ekspansi sawit, yang dinyatakan ditimbulkan oleh ekspansi kelapa sawit oleh pengkritik sawit, PASPI merespons dengan pernyataan hal itu tidak benar dan tidak beralasan. Untuk mendukung pernyataan tersebut, PASPI menggunakan data statistik bencana alam yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan statistik bencana alam BPS, PASPI menegaskan bahwa banjir terjadi di semua provinsi di Indonesia dan paling sering terjadi di daerah-daerah yang tidak menjadi pusat-pusat ekspansi kelapa sawit. Oleh karena itu, bencana banjir tidak ada kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit (PASPI, 2016, p. 61). "Fenomena bencana banjir merupakan bagian dari perubahan iklim global yang menyebabkan bencana banjir terjadi hampir di seluruh negara di dunia dan tidak ada kaitannya dengan perkebunan kelapa sawit" (GAPKI, 2017c).

GAPKI juga menyatakan bencana banjir yang terjadi di Indonesia tidak ada hubungannya dengan ekspansi sawit. Argumen GAPKI adalah dengan mengutip data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2015. Bencana banjir sering terjadi di provinsi yang tidak ada perkebunan kelapa sawit (GAPKI, 2017a) dan banjir terjadi di seluruh dunia.

4.2.3. Ekspansi Kelapa Sawit Bukan Penyebab Perubahan Iklim Global

PASPI menegaskan pandangan yang menyatakan ekspansi kelapa sawit berkontribusi penting terhadap perubahan iklim adalah keliru (PASPI, 2016, p. 119). Argumen pokok PASPI: "pemanasan global disebabkan oleh peningkatan intensitas efek gas rumah kaca pada atmosfer bumi, bukan oleh ekspansi kelapa sawit".

4.2.4. Tidak hanya Ekspansi Kelapa Sawit Penghasil Polusi Udara

Terkait dengan polusi udara akibat kebakaran lahan dan hutan yang dikaitkan dengan pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit, PASPI menyatakan hal itu suatu pembicaraan yang menyudutkan perkebunan kelapa sawit. Kesimpulan PASPI ini didasarkan atas dua argumen: 1) Realitasnya ekspansi sawit tidak selalu disertai oleh kebakaran lahan dan hutan, dan 2) kebakaran lahan dan hutan tidak khas daerah sentra perkebunan sawit. Untuk mendukung argumen tersebut, sama dengan wacana tentang hal yang lain, PASPI membandingkan kejadian kebakaran lahan dan hutan di provinsi sentra kelapa sawit dengan yang tidak. Berdasarkan perbandingan itu, PASPI menyimpulkan bahwa kebakaran lahan dan hutan merupakan fenomena lumrah di Indonesia dan bahkan dunia. Tambahan lagi, kebakaran lahan dan hutan terjadi baik di sentra dan bukan sentra ekspansi sawit. Karena itu, ekspansi kebun sawit tidak patut dinyatakan sebagai penyebab kebakaran hutan/lahan. PASPI memperkuat argumennya dengan mengutip pernyataan Global Forest Watch: "Sekitar 60 persen titik api ternyata berada di luar konsesi yakni dalam area hutan negara, konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) sebesar 26 persen, sedangkan titik api dalam konsesi perkebunan kelapa sawit hanya sekitar 10 persen.

4.3. Respon Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia memunculkan wacana solusi dampak negatif ekspansi sawit. Seperti yang terlihat dari kebijakannya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan minyak sawit Indonesia yang berkelanjutan. Kelapa sawit dipandang penting untuk perekonomian Indonesia sebagai pemecahan dari kesulitan perekonomian (Afrizal, 2007), tetapi disadari pula dampak negatif produksi minyak sawit terhadap lingkungan. Mempertimbangkan kedua hal tersebut, pilihan kebijakan pemerintah Indonesia adalah pengembangan produksi minyak sawit dengan mengontrolnya agar ekspansi kelapa sawit tidak merusak lingkungan. Wacana perkebunan kelapa sawit berkelanjutan dan tata kelola sawit yang berkelanjutan diluncurkan oleh pemerintah ke publik.

Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan itu sendiri diartikan sebagai usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang memenuhi tiga kelayakan: layak ekonomi, layak sosial, dan layak lingkungan. Layak lingkungan itu adalah ramah lingkungan yang indikator-indikator untuk menilainya dituangkan dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Pertama kali, pemerintah Indonesia membuat pedoman perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Pertanian tentang Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Perkebunan kelapa sawit diwajibkan memiliki sertifikat ISPO. Kepemilikan sertifikat ISPO tersebut dinyatakan sebagai indikator praktik produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Sampai akhir 2019, ada sebanyak 502 perusahaan kelapa sawit yang telah memiliki sertifikat ISPO dengan total luas lahan 2,8 juta ha (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2019).

Kemudian, pada akhir tahun 2019 pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Peningkatan kapasitas perkebunan, pengelolaan lingkungan, dan percepatan sertifikasi minyak sawit Indonesia adalah tiga hal yang dinyatakan untuk dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah yang relevan. Terkait dengan pengelolaan lingkungan, upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca di kebun dan lahan dinyatakan akan dilakukan. Penanganan deforestasi yang disorot oleh pengkritik ekspansi sawit tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kebijakan tersebut. Belum ada laporan tentang efektivitas kebijakan tersebut.

4.4. Pembahasan

Wacana relasi ekspansi sawit dengan bencana alam dibangun oleh pihak-pihak pengkritik ekspansi sawit dan para pendukung ekspansi sawit di Indonesia. Pengkritik sawit adalah ahli lingkungan hidup dan aktivis NGO lingkungan, sedangkan pendukung sawit adalah asosiasi pengusaha sawit dan organisasi yang berafiliasi padanya seperti PASPI. Para pengkritik sawit tidak menginginkan perkebunan kelapa sawit tidak dikembangkan di Indonesia. Hal yang mereka inginkan adalah pengontrolan yang ketat terhadap produksi CPO.

Terkait dengan diskursus ekspansi sawit penyebab bencana alam, jantung perdebatan sebenarnya pada kontribusi perkebunan sawit terhadap peningkatan intensitas efek rumah kaca. Pengkritik menyatakan ekspansi sawit berkontribusi berarti terhadap intensitas efek rumah kaca, yang menyebabkan perubahan iklim yang kemudian salah satu penyebab bencana alam. Kontribusi ekspansi sawit melalui deforestasi. Hal ini kemudian menjadi perdebatan kedua belah pihak. Argumen keduanya berpusat pada status lahan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit skala besar: Apakah lahan yang digunakan lahan berhutan atau tidak? Menurut para pengkritik, ekspansi sawit menyebabkan alih fungsi lahan berhutan menjadi area perkebunan kelapa sawit. Misalnya, ketika menolak ekspansi sawit di Papua, WALHI menyatakan ekspansi sawit di Papua dilakukan dalam kawasan berhutan dengan cara melepaskan status kawasan hutan lokasi tersebut – alih fungsi kawasan hutan (WALHI, 2019a). Pandangan WALHI terdukung oleh penelitian Rival & Levang pada 2014, yang menemukan cukup luas lahan berhutan yang dikonversi menjadi lahan perkebunan sawit: “In the span of a few decades, Indonesia has seen the conversion of more than 5 million hectares of primary forest... Environmental NGOs are right to emphasize this negative aspect of oil palm expansion” (Rival & Levang, 2014, p. 34). Proponen sawit justru membantah hal tersebut dengan menyatakan kelapa sawit umumnya ditanam di lahan yang telah mengalami deforestasi oleh aktivitas perusahaan pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) (PASPI, 2016, p. 119). Pandangan PASPI ini sesuai dengan pandangan beberapa ahli kehutanan Indonesia (wartaekonomi.co.id, 2017).

Para peneliti mengkonfirmasi ekspansi sawit cukup luas dilakukan di wilayah yang berhutan. Berdasarkan penelitian studi kasus di Distrik Bularan (di Sabah, Malaysia) dengan menggunakan citra satelit, Norwana *et al.* (2011) melaporkan bahwa ekspansi sawit antara 1970-1980 di wilayah yang diteliti telah mengubah wilayah yang dulunya hutan menjadi area perkebunan kelapa sawit. Kondisi seperti itu mereka sebut sebagai degradasi hutan. Para peneliti yang lain, Obidzinski *et al.* (2012) juga menyimpulkan bahwa ekspansi perkebunan sawit menyebabkan deforestasi. Kemudian, berdasarkan telaahan terhadap hasil-hasil penelitian di Malaysia dan Indonesia, Sheil *et al.* (2009) melaporkan perkebunan kelapa sawit memang penyebab deforestasi. Walaupun berbagai hasil penelitian menyampaikan bahwa sebagian perkebunan kelapa sawit dilakukan di atas lahan yang telah tidak berhutan akibat tegakkan dalam lahan telah dihabisi sebelumnya oleh perusahaan pemegang konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Pengembangan perkebunan sawit di atas lahan hutan cukup luas dan berarti bagi deforestasi. Berdasarkan itu, walaupun tidak seluruh perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan mengkonversi hutan. Sheil *et al.* (2009) menyatakan bahwa ekspansi perkebunan kelapa sawit memang salah satu penyebab utama deforestasi.

Emisi karbon akibat deforestasi terjadi melalui dua cara: Pertama, deforestasi menyebabkan emisi karbon yang tersimpan dalam tanah yang sebelumnya tetap berada dalam tanah karena terhalang oleh tutupan tanah (Richard, 2005, p. 16; Hufty & Haakenstad, 2011, pp. 1-2; Bennett, 2017, p. 5); Tegakkan yang telah tidak ada membuat karbon yang dilepas ke udara tidak tertangkap (Philander, 2012; Richard, 2005, p. 13); Kedua, pembukaan lahan gambut besar-

besaran untuk pembukaan kebun sawit baru juga dinyatakan penyebab deforestasi di lahan gambut yang menyebabkan emisi karbon ke udara, karena karbon tersimpan dalam jumlah banyak dalam lahan gambut (Wibowo, 2010, pp. 254-255; van Noordwijk et al., 2007).

Emisi karbon ke udara yang di luar kemampuan alam untuk menetralisasi mengakibatkan terjadinya perubahan iklim: perubahan temperatur, kelembaban, curah hujan, dan angin pada suatu wilayah yang telah terpola dalam waktu yang lama (Philander, 2012, p. 210; Nwankwoala, 2015, pp. 225-226). Fenomena ini disebut sebagai perubahan iklim antropogenik, perubahan iklim terkait dengan perbuatan manusia. Perubahan iklim antropogenik disebabkan oleh pemanasan bumi, sering disebut pemanasan global, akibat dari aktivitas manusia yang mengeluarkan karbon ke atmosfer.

Perubahan iklim menyebabkan bencana alam (seperti kemarau panjang, banjir, dan tanah longsor) melalui perubahan pola curah hujan yang ditimbulkan oleh iklim yang berubah di suatu wilayah (Philander, 2012, p. 210; Jameti & Corfee-Morlot, 2009, p. 6). Untuk informasi tambahan, di Delta Sungai Mekong (di Vietnam), perubahan iklim diyakini penyebab naiknya permukaan air laut yang kemudian menyebabkan intrusi air laut ke darat, ini menyebabkan salinasi area pertanian yang merusak tanaman padi (Pham et al., 2018, p. 2142).

Walaupun menyadari ada kontribusi perkebunan sawit terhadap intensitas efek gas rumah kaca, PASPI menyatakan kontribusinya jauh lebih kecil dari produksi komoditas lain. Dengan argumen tersebut, sebenarnya PASPI menyatakan kontribusi deforestasi (yang juga menurutnya kecil dari ekspansi sawit) akibat ekspansi sawit tidak berkontribusi penting terhadap perubahan iklim. Dengan pernyataan ini, dapat disimpulkan PASPI membantah ekspansi kelapa sawit secara tidak langsung penyebab bencana alam.

Walaupun sama-sama membangun logika komparatif untuk berargumen, keduanya mengusung logika komparatif berbeda. Pengkritik ekspansi sawit melakukan komparasi kondisi area sekitar ekspansi sawit sebelum dan pada saat ekspansi sawit terjadi (saat operasi) serta fokus hanya pada sawit. Sementara proponent ekspansi sawit menggunakan logika komparatif antar wilayah dan antar tanaman. Mereka mendasarkan argumen pada komparasi antara sawit dengan tanaman penghasil minyak nabati dan biomass lainnya (utamanya kacang kedelai, rapeseed, dan bunga mata hari).

Komparasi berbeda itu menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Dibandingkan dengan kondisi sebelum ekspansi sawit dengan kondisi saat perkebunan kelapa sawit berkembang di wilayah yang sekarang menjadi pusat-pusat perkebunan sawit, pengkritik menyatakan kondisi lingkungan saat perkebunan kelapa sawit beroperasi terdegradasi dan banjir lebih sering terjadi. Berdasarkan perbandingan itu, ekspansi kelapa sawit dijadikan variabel independen bencana alam seperti banjir genangan. Tetapi, jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang tidak ada ekspansi sawit dengan yang ada ekspansi sawit, frekuensi banjir dan kebakaran hutan lebih banyak di provinsi yang tidak ada ekspansi sawit, seperti yang dinyatakan oleh pendukung sawit berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Berdasarkan itu, dinyatakan ekspansi sawit bukan penyebab banjir dan kebakaran hutan.

Terkait dengan kebakaran lahan/hutan, perdebatan pengkritik dengan proponent ekspansi sawit berkembang ke arah identitas pelaku kebakaran. Pengkritik menekankan pelaku merupakan perusahaan berskala besar, sedangkan proponent menegaskan pelaku utama adalah petani kecil.

Perbedaan tajam diantara keduanya karena masing-masing mendasarkan pandangan pada sudut yang berlawanan: Para pengkritik menggunakan sudut pandang Paradigma Ekologis Baru (PEB), sedangkan para pendukung ekspansi sawit mendasarkan pandangan terhadap Paradigma Keterpisahan Manusia (PKM). Ini terlihat pada para pengkritik sawit yang

menyoroti ekspansi sawit dari sudut kemaslahatan alam: kelestarian alam. Meneropong dari sudut ini, mereka menyatakan bahwa ekspansi sawit merupakan salah satu penyebab berarti kerusakan lingkungan, kerusakan lingkungan itu kemudian dinyatakan sebagai penyebab langsung dan tidak langsung terjadinya bencana alam. Sementara cara ekspansi sawit penyebab tidak langsung bencana alam adalah melalui kontribusi penting ekspansi sawit terhadap pemanasan global melalui deforestasi yang ditimbulkan, cara ekspansi kelapa sawit penyebab langsung bencana alam adalah melalui kerusakan ekologis lokal akibat dari ekspansi kelapa sawit. Di sisi lain, para pendukung sawit (PASPI dan GAPKI) melihat dari sudut keperluan ekspansi sawit bagi keberlangsungan perekonomian, ini adalah penelaahan dari sudut kepentingan manusia.

Penekanan PASPI dan GAPKI terhadap sawit sebagai solusi bagi masalah-masalah perekonomian yang ditimbulkan oleh modernitas memperlihatkan pandangan PKM yang terkandung dalam wacana mereka. PASPI dan GAPKI menonjolkan kontribusi penting sawit bagi perekonomian Indonesia, sebagai alternatif penting untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi (PASPI, 2016, pp. 1-8). GAPKI membangun wacana minyak sawit pengisi kebutuhan negara. Misalnya, GAPKI menyatakan untuk konteks Uni Eropa, minyak sawit berkontribusi penting: menciptakan banyak lapangan pekerjaan di Eropa, memberikan sumber pendapatan kepada banyak orang di Eropa, memberikan pajak yang besar terhadap pemerintah negara-negara di Eropa (GAPKI, 2017b). Akibat sudut pandang antroposen tersebut, perhatian terhadap dampak negatif ekspansi sawit kurang diperhatikan.

Narasi dampak ekologis ekspansi kelapa sawit, yang dengan itu wacana kaitan antara ekspansi sawit dengan bencana alam ditemukan, antara pengkritik dan pendukung ekspansi sawit memperlihatkan kontradiksi antara pandangan Paradigma Ekologis Baru (PEB) dengan Paradigma Keterpisahan Manusia (PKM). PKM melihat relasi antara masyarakat dengan alam dari sudut kepentingan masyarakat: Alam ditempatkan sebagai sesuatu untuk melayani kebutuhan manusia, penekanan terhadap kemampuan manusia untuk memecahkan persoalan-persoalan akibat memenuhi kebutuhan masyarakat, pertimbangan terfokus pada kepentingan manusia. Pandangan proponen ekspansi sawit seperti PASPI dan GAPKI memperlihatkan pandangan PKM itu, pandangan tentang kelapa sawit dilihat dari sudut pemenuhan kebutuhan manusia. Ini terlihat salah satunya pada kutipan wacana di bawah ini.

Pertanyaannya adalah untuk memenuhi tambahan kebutuhan minyak nabati tersebut, apakah masyarakat dunia memilih meningkatkan produksi minyak kedelai atau minyak sawit? ..Jika masyarakat dunia memilih cara pemenuhan tambahan minyak nabati menuju 2050 dari peningkatan produksi minyak kedelai maka diperlukan tambahan areal baru kebun kedelai dunia seluas 340 juta hektar (dengan asumsi produktivitas 0.5 ton minyak/hektar). Hal ini berarti masyarakat dunia akan menghilangkan hutan (deforestasi) seluas 340 juta hektar di Amerika Selatan ..Jika masyarakat dunia memilih pemenuhan tambahan kebutuhan minyak nabati dunia menuju 2050 dari minyak sawit, maka ekspansi kebun sawit (tambahan) yang diperlukan hanya cukup seluas 34 juta hektar (PASPI, 2016, pp. 299-300).

PEB memandang relasi masyarakat dengan alam dari sudut yang lain yakni sudut alam. Masyarakat diyakini perlu menyesuaikan diri dengan keterbatasan alam. Pandangan PEB ini terlihat pada wacana pengkritik ekspansi sawit, itu mereka gunakan untuk menilai ekspansi sawit. Pengkritik sawit seperti WALHI melihat dari sudut kepentingan alam ketika membicarakan ekspansi sawit, bukan kepentingan ekonomi (bisnis, lapangan pekerjaan, dan pendapatan negara). Pandangan ini yang menyebabkan mereka tidak melakukan analisis komparatif kelapa sawit dengan tanaman penghasil bioenergi yang lain, melainkan hanya

fokus pada dampak ekspansi kelapa sawit terhadap ekosistem di wilayah sentra ekspansi sawit.

Pemerintah Indonesia merespons kritik terhadap ekspansi kelapa sawit dengan cara mempertimbangkan pandangan pengkritik. Karena pemerintah Indonesia memandang industri kelapa sawit sebagai sumber pendapatan dan penyediaan lapangan pekerjaan yang berarti serta merespons pengkritik secara positif, wacana ekspansi kelapa sawit pemerintah Indonesia adalah modernisasi ekologis karena ekspansi kelapa sawit berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan dampak positif terhadap perekonomian, perhatian diberikan pada pengendalian produksi CPO. Seperti yang terlihat dari kebijakannya, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertanian menerapkan kebijakan minyak sawit Indonesia berkelanjutan. Kelapa sawit dipandang penting untuk perekonomian Indonesia, pemecahan dari kesulitan pengembangan perekonomian (Afrizal, 2007), tetapi disadari pula dampak negatif produksi minyak sawit terhadap lingkungan. Konsekuensinya, pilihan kebijakan pemerintah Indonesia adalah pengembangan produksi minyak sawit dengan niat untuk mengontrolnya sehingga ekspansi kelapa sawit tidak merusak lingkungan. Untuk ini, wacana produksi minyak sawit ramah lingkungan dan tata kelola sawit yang berkelanjutan dilontarkan. Inilah penyebab mengapa ide moratorium ekspansi kelapa sawit yang dikumandangkan oleh WALHI sulit untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia.

Pemecahan masalah Pemerintah Indonesia digunakan wacana pihak yang netral, pihak yang menyajikan pembahasan secara berimbang. Salah satunya publikasi hasil penelitian IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources). Dengan menggunakan logika komparatif, IUCN melakukan metanalisis terhadap hasil-hasil penelitian tentang dampak ekspansi kelapa sawit (Meijaard et al, 2018). Dalam laporan penelitian yang dikeluarkan pada tahun 2018, badan PBB ini menyimpulkan dibandingkan dengan penghasil minyak nabati lain, walaupun dampak lingkungan ekspansi sawit lebih kecil, dampak lingkungan dari kelapa sawit signifikan. Berdasarkan itu, argumen IUCN adalah jika yang dipersoalkan hanya pemenuhan kebutuhan dunia akan energi alternatif, khususnya energi biodiesel, perkebunan kelapa sawit pilihan yang lebih baik untuk kelestarian alam dengan memperhatikan dampak buruk yang ditimbulkannya terhadap lingkungan. Artinya, kesimpulan IUCN berdasarkan kajian metanalisis tidak menyatakan bahwa produksi minyak sawit tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Kesimpulan badan itu sesungguhnya menyatakan bahwa dibandingkan dengan yang lain, sawit lebih baik. Bila hanya ekspansi perkebunan kelapa sawit sendiri dibicarakan, sebenarnya IUCN berdasarkan studi metanalisis tersebut menyimpulkan bahwa perkebunan kelapa sawit besar-besaran berdampak buruk terhadap lingkungan.

Karena itu, kesimpulan IUCN adalah sementara kelapa sawit lebih baik dari tanaman penghasil bioenergi yang lain, dia sendiri juga berdampak tidak baik terhadap lingkungan, karena itu penting dilakukan perbaikan produksi sawit dan penghentian deforestasi untuk ekspansi baru sawit. Kesimpulan tersebut tertera dalam pernyataan IUCN ini "*A greater demand for sustainably produced palm oil should put pressure on producers to improve practices... by far the biggest gains for biodiversity in an oil palm context are through avoiding further deforestation* [Permintaan yang lebih besar terhadap minyak sawit yang berkelanjutan harus memberi tekanan pada produsen untuk memperbaiki praktik produksi minyak sawit...Sejauh ini penjagaan keanekaragaman hayati pada konteks kelapa sawit dilakukan dengan cara menghindari deforestasi lebih lanjut]"(Meijaard et al, 2018, p. 83).

Publikasi netral kedua yang dipertimbangkan adalah yang ditulis oleh Rival & Levang (2014). Mereka menyoroti dengan cara berbeda wacana ekspansi sawit. Sementara tulisan ini

juga menyatakan ekspansi kelapa sawit menimbulkan dampak berarti terhadap lingkungan (seperti deforestasi), persoalan yang ditimbulkan bukan karena tanaman sawit itu sendiri, melainkan oleh cara manusia menanam tanaman itu. Benar, kata mereka, tanaman sawit paling efisien memproduksi minyak sawit dibandingkan dengan yang lain dan menggantikannya dengan yang lain tidaklah pilihan yang tepat, tetapi benar pula cara minyak sawit diproduksi menimbulkan masalah.

Apa yang terjadi sesungguhnya adalah hal yang disimpulkan oleh dua peneliti ini: "Gambarannya lebih kompleks; kelapa sawit bukan satu hal, bukan pula hal yang lain, tetapi keduanya pada waktu yang sama" (Rival & Levang, 2014, p. 20). Karena itu, penelitian ini mendukung pandangan modernisasi ekologis untuk menangani kontroversi ekspansi sawit di Indonesia.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, telah ada kebijakan perkebunan sawit berkelanjutan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, dampak kebijakan ini terhadap tindakan korporasi belum memuaskan (Morgans *et al.*, 2018). Karena itu, disamping standar-standar ISPO terus dibuat lebih sensitif terhadap dampak ekologis ekspansi sawit, proses sertifikasi produksi CPO perlu dilakukan efektif. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan perkebunan sawit perlu ditingkatkan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil.

5. Kesimpulan

Dengan fokus pada analisis wacana kaitan antara ekspansi sawit dengan bencana alam, penelitian ini memperlihatkan ekspansi sawit yang terus kontroversial di Indonesia, terlihat dari wacana oposisi satu sama lain yang dipublikasikan baik oleh pengkritik dan proponent ekspansi sawit. Terkait dengan wacana dampak ekologis ekspansi sawit, perbincangan keduanya mengandung pandangan yang kontradiktif: antara pandangan Paradigma Keterpisahan Manusia (PKM), populer disebut *Human Exemptionalism Paradigm* (HEP) dengan pandangan Paradigma Ekologi Baru (PEB), dalam literatur sosiologi lingkungan populer disebut *New Ecological Paradigm* (NEP). Pandangan proponent ekspansi sawit seperti PASPI, GAPKI, dan pemerintah Indonesia adalah pandangan PKM. Sementara pandangan pengkritik mengandung argumen PEB. Proponent ekspansi sawit menekankan terhadap manfaat ekspansi sawit bagi manusia (bagi sumber pendapatan pemerintah dan kesejahteraan warga). Namun pengkritik menekankan pada keharusan penyesuaian produksi minyak sawit terhadap keterbatasan alam di Indonesia. Untuk membangun argumen, keduanya menggunakan logika komparatif yang berbeda: Paraproponent menggunakan komparasi antarwilayah dan antartanaman penghasil minyak nabati, sementara pengkritik menggunakan komparasi waktu. Logika komparatif yang berbeda itu menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula.

Karena PKM dan PEB menekankan pada hal yang berbeda, pada konteks Indonesia, wacana modernisasi ekologis, yang digunakan oleh pemerintah Indonesia, merupakan jalan tengah yang perlu didukung dan diterapkan secara konsisten agar kontribusi positif produksi minyak sawit terhadap rakyat Indonesia tidak disertai dengan degradasi lingkungan yang kemudian penyebab bencana alam.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

7. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2007). *The Nagari Community, Business and the State: The Origin and the Process of Contemporary Agrarian Protests in West Sumatra, Indonesia*. Bogor, Indonesia: Forest Peoples Programme and Sawit Watch.
- Albrecht, D. E. (1982). *The New Ecological Paradigm: an exploration into the nature and correlates of Iowan's environmental orientations* (Dissertation). Iowa State University. <https://doi.org/10.31274/rtd-180813-5513>
- Amalia, R., Dharmawan, A. H., Prasetyo, L. B., & Pacheco, P. (2019). Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 17(1), 130–139. <https://doi.org/10.14710/jil.17.1.130-139>
- Amérigo, M., Aragonés, J. I., de Frutos, B., Sevillano, V., & Cortés, B. (2007). Underlying Dimensions of Ecocentric and Anthropocentric Environmental Beliefs. *The Spanish Journal of Psychology*, 10(1), 97–103. <https://doi.org/10.1017/s1138741600006351>
- Amérigo, M., Aragonés, J. I., & García, J. A. (2012). Exploring the dimensions of environmental concern. An integrative proposal. *Psychology*, 3(3), 353–365. <https://doi.org/10.1174/217119712802845723>
- Andersen, M. S., & Massa, I. (2000). Ecological modernization – origins, dilemmas and future directions. *Journal of Environmental Policy and Planning*, 2(4), 337–345. <https://doi.org/10.1080/714852820>
- Austin, K., Mosnier, A., Pirker, J., McCallum, I., Fritz, S., & Kasibhatla, P. (2017). Shifting patterns of oil palm driven deforestation in Indonesia and implications for zero-deforestation commitments. *Land Use Policy*, 69, 41–48. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.036>
- Bennett, L. (2017, April 18). Deforestation and Climate Change. Retrieved September 2019, from <http://climate.org/deforestation-and-climate-change/>
- Carolan, M. S. (2004). Ecological Modernization Theory: What About Consumption? *Society & Natural Resources*, 17(3), 247–260. <https://doi.org/10.1080/0894120490270294>
- Catton, W., & Dunlap, R. (1978). Environmental Sociology: A New Paradigm. *The American Sociologist*, 13(1), 41–49. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/27702311>
- Colchester, M., & Chao, S. (2013). *Conflict or Consent?: The Oil Palm Sector at a Crossroads*. Bogor, Indonesia: Forest Peoples Programme, Sawit Watch and TUK Indonesia.
- Deutsche Welle. (2019, September 16). Gugatan Pidana bagi Pelaku Pembakaran Hutan. Retrieved from <https://www.dw.com/id/gugatan-pidana-bagi-pelaku-pembakaran-hutan/a-50443840>
- Dharmawan, A. H., Mardiyarningsih, D. I., & Yulian, B. E. (2016, May). Expansion of oil palm plantations and changes in social, economic and rural ecology: a case study in Kutai Kartanegara (Project Working Paper Series OPAL No. 01/2016). Center for Agricultural and Rural Development Studies - Bogor Agricultural University. Retrieved from https://www.opal-project.org/wp-content/uploads/2020/04/20160620_project_working_paper_series_opal_no_01.pdf

- Direktorat Jenderal Perkebunan. (2019). Buku Statistik Perkebunan Kelapa Sawit: 2018-2020. Retrieved from <http://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-publikasi-statistik-2018-2020>
- Dunlap, R. E., Van Liere K. D., Mertig A. G. & Jones R. E. (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revised NEP scale. *Journal of Social Issues*, 56(3), 425-442. Retrieved from <https://core.ac.uk/display/23659841>
- Emilya, U. R., & Sumiyati, Y. (2018). Pencemaran Udara Akibat Pembukaan Lahan Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Cara Dibakar Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat Dan Penegakan Hukumnya. *Prosiding Ilmu Hukum SPeSIA*, 708-711. Bandung, Indonesia. Retrieved from <http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum/article/view/10874>
- GAPKI. (2017a, June 30). Sawit Paling Hemat Deforestasi. Retrieved from <https://gapki.id/news/2642/sawit-paling-hemat-deforestasi>
- GAPKI. (2017b, July 3). Mereka bilang perkebunan kelapa sawit penyebab bencana banjir ..? Retrieved from <https://gapki.id/news/960/mereka-bilang-perkebunan-kelapa-sawit-penyebab-bencana-banjir>
- GAPKI. (2017c, July 3). Resolusi Minyak Sawit Uni Eropa & Isu Deforestasi. Retrieved from <https://gapki.id/news/2389/resolusi-minyak-sawit-uni-eropa-isu-deforestasi>
- Glauber, A. J., & Gunawan, I. (2016). The Cost of Fire: An Economic Analysis of Indonesia's 2015 Fire Crisis. The World Bank. Retrieved from <http://hdl.handle.net/10986/23840>
- Hufty, M., & Haakenstad, A. (2011). Reduced Emissions for Deforestation and Degradation: A Critical Review. *Consilience*, (5), 1-24. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/26167800>
- Jameti, S., & Corfee-Morloti, J. (2009, April). Assessing the Impacts of Climate Change: A Literature Review (OECD Economics Department Working Papers No. 691). OECD. <https://doi.org/10.1787/224864018517>
- Khairunnisa, A. (2018). Dampak Industri Perkebunan Kelapa Sawit di Riau Terhadap Ekosistem Lingkungan. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/325312235_Dampak_Industri_Perkebunan_KelapaSawit_di_Riau_Terhadap_Ekosistem_Lingkungan
- Kompasiana.com. (2015, June 25). Ternyata Sawit Penyebab Banjir dan Kekeringan - Kompasiana.com. KOMPASIANA. Retrieved from <https://www.kompasiana.com>
- Kortenkamp, K. V., & Moore, C. F. (2001). Ecocentrism and Anthropocentrism: Moral Reasoning about Ecological Commons Dilemmas. *Journal of Environmental Psychology*, 21(3), 261-272. <https://doi.org/10.1006/jevp.2001.0205>
- LIPI. (2015). Diskusi Pakar: Kebakaran Hutan dan Lahan serta Bencana Asap di Provinsi Jambi. Retrieved from <https://kependudukan.lipi.go.id/berita/diskusi-pakar-kebakaran-hutan-dan-lahan-serta-bencana-asap-di-provinsi-jambi/>
- Majalah Sawit Indonesia. (2014, September 8). Kontribusi Kelapa Sawit Sebagai Pilar Perekonomian Bangsa. Retrieved from <https://sawitindonesia.com/kontribusi-kelapa-sawit-sebagai-pilar-perekonomian-bangsa/>
- Meijaard, E., Garcia-Ulloa, J., Sheil, D., Wich, S. A., Carlson, K. M., Juffe-Bignoli, D., & Brooks, T. M. (2018). Oil palm and biodiversity. Retrieved from <https://portals.iucn.org/library/node/47753>
- Mol, A. P., & Spaargaren, G. (2000). Ecological modernisation theory in debate: A review. *Environmental Politics*, 9(1), 17-49. <https://doi.org/10.1080/09644010008414511>

- Mongabay.co.id. (2013, September 2). Ekspansi Sawit Ancaman Serius Bagi Masyarakat Lokal. Retrieved from <http://readersblog.mongabay.co.id/rb/2013/09/02/ekspansi-sawit-ancaman-serius-bagi-masyarakat-lokal/>
- Morgans, C. L., Meijaard, E., Santika, T., Law, E., Budiharta, S., Ancrenaz, M., & Wilson, K. A. (2018). Evaluating the effectiveness of palm oil certification in delivering multiple sustainability objectives. *Environmental Research Letters*, 13(6), 064032. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aac6f4>
- Norwana, A. A. B. D., Kunjappan, R., Chin, M., Schoneveld, G. C., Potter, L., & Andriani, R. (2011). The local impacts of oil palm expansion in Malaysia: An assessment based on a case study in Sabah State. Center for International Forestry Research. <https://doi.org/10.17528/cifor/003771>
- Noveria, M., Gayatri H. I. & Mashudi. (2004). *Berbagi Ruang dengan Masyarakat: Upaya Resolusi Konflik Sumberdaya Hutan di Kalimantan Tengah*. Jakarta: Puslit. Kemasyarakatan dan Kebudayaan-LIPI.
- Nwankwoala, H. N. L. (2015). Causes of Climate and Environmental Changes: The need for Environmental-Friendly Education Policy in Nigeria. *Journal of Education and Practice*, 6(30), 224-234. Retrieved from <https://www.iiste.org/Journals/index.php/JEP/article/view/26733/27383>
- Obidzinski, K., Andriani, R., Komarudin, H., & Andrianto, A. (2012). Environmental and Social Impacts of Oil Palm Plantations and their Implications for Biofuel Production in Indonesia. *Ecology and Society*, 17(1), 25. <https://doi.org/10.5751/es-04775-170125>
- PASPI. (2016). *Mitos dan Fakta: Industri Minyak Sawit Indonesia dalam Isu Sosial, Ekonomi dan Lingkungan Global*. (2nd eds.). Bogor, Indonesia: PASPI.
- Pham, V. H. T., Febriamansyah, R., Afrizal, A., & Tran, T. A. (2018). Government Intervention and Farmers' Adaptation to Saline Intrusion: A Case Study in the Vietnamese Mekong Delta. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 8(5), 2142. <https://doi.org/10.18517/ijaseit.8.5.7090>
- Philander, G. (2012). *Encyclopedia of Global Warming and Climate Change, Second Edition* (Second ed.). Los Angeles, United States: SAGE Publications, Inc.
- Potter, L. (2015). *Managing oil palm landscapes: A seven-country survey of the modern palm oil industry in Southeast Asia, Latin America and West Africa* (Occasional Paper 122). Center for International Forestry Research. <https://doi.org/10.17528/cifor/005612>
- Purnomo, H., Okarda, B., Dewayani, A. A., Ali, M., Achdiawan, R., Kartodihardjo, H., . . . Juniwati, K. S. (2018). Reducing forest and land fires through good palm oil value chain governance. *Forest Policy and Economics*, 91, 94-106. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.12.014>
- Republika.go.id. (2013, October 24). Jumlah Petani Sawit Meningkat. *Republika Online*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/10/24/mv669x-jumlah-petani-sawit-meningkat>
- Richard, A. H. (2005). Tropical Deforestation and Climate Change. In A. Paulo & S. Stephan (Eds.), *Tropical Deforestation and Climate Change* (p.). Washington, DC: IPAM.
- Rival, A. & Levang P. (2014). *Palms of controversies: Oil palm and development challenges*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Sheil, D., Casson A., Meijaard E. & van Noordwijk M. (2009). *The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia*. Bogor, Indonesia: CIFOR.
- Syahza, A. (2008, September 9). Pengaruh Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Ekonomi Regional Daerah Riau. Retrieved from <https://www.bunghatta.ac.id/artikel->

253-pengaruh-pembangunan-perkebunan-kelapa-sawit-terhadap-ekonomi-regional-daerah-riau.html

- Tandan Sawit. (2015). Menyoal Tuduhan Kampanye Hitam Terhadap Industri Sawit. In *Menata Industri Sawit Demi Keberlanjutan Alam Dan Kesejahteraan Rakyat* (1st ed., pp. 6–9). Bogor, Indonesia: Sawit Watch. Retrieved from <http://sawitwatch.or.id/wp-content/uploads/2015/03/Tandan-Sawit-No-1-2015.pdf>
- Tempo.co. (2017, March 23). Banjir di Riau, Walhi: Biangnya Izin Tambang dan Kelapa Sawit. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/858959/banjir-di-riau-walhi-biangnya-izin-tambang-dan-kelapa-sawit>
- The Economist. (2018, November 30). Palm oil and deforestation. Retrieved from <https://foodsustainability.eiu.com/palm-oil-and-deforestation/>
- TUK Indonesia. (2015, January 22). Dampak kelapa sawit. Retrieved from <https://www.tuk.or.id/2015/01/dampak-kelapa-sawit/>
- Vijay, V., Pimm, S. L., Jenkins, C. N., & Smith, S. J. (2016). The Impacts of Oil Palm on Recent Deforestation and Biodiversity Loss. *PLOS ONE*, 11(7), e0159668. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0159668>
- WALHI. (2019a, April 3). Menolak Pernyataan Menteri Kemaritiman, WALHI Papua: Sawit Terbukti Memperburuk Kehidupan Orang Asli Papua. Retrieved from <https://www.walhi.or.id/wp-content/uploads/2019/04/Rilis-Walhi-Papua-02-April-2019.pdf>
- WALHI. (2019b, September 6). Kejahatan Trans National Corporations dalam kebakaran hutan dan lahan di Indonesia Dibawa ke Jenewa. Retrieved from <https://www.walhi.or.id/kejahatan-trans-national-corporations-dalam-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-indonesia-dibawa-ke-jenewa>
- Wartaekonomi.co.id. (2017, March 31). Sejumlah Pakar Sebut Sawit Bukan Penyebab Deforestasi. Retrieved from <https://www.wartaekonomi.co.id/read136064/sejumlah-pakar-sebut-sawit-bukan-penyebab-deforestasi>
- Wibowo, A. (2010). Konversi Hutan Menjadi Tanaman Kelapa Sawit Pada Lahan Gambut: Implikasi Perubahan Iklim Dan Kebijakan. *Jurnal Penelitian Sosial Dan Ekonomi Kehutanan*, 7(4), 251–260. <https://doi.org/10.20886/jsek.2010.7.4.251-260>
- van Noordwijk, M., Purnomo, H., Peskett, L., & Setiono, B. (2008). Reducing emissions from deforestation and forest degradation (REDD) in Indonesia: options and challenges for fair and efficient payment distribution mechanisms. Retrieved from <https://www.cifor.org/knowledge/publication/2919/>

Tentang Penulis

1. **Siska Adhariani** memperoleh gelar Sarjana Sosiologi dari Universitas Andalas, Indonesia, pada tahun 2019. Penulis adalah mahasiswa pada Program Studi Magister Sosiologi, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia.
E-Mail: siskaadhariani@gmail.com
2. **Afrizal** memperoleh gelar Doktor dari The Flinders University of South Australia, pada tahun 2006. Penulis adalah Profesor pada Program Studi Magister Sosiologi, Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia.
E-Mail: afrizal@soc.fisip.unand.ac.id